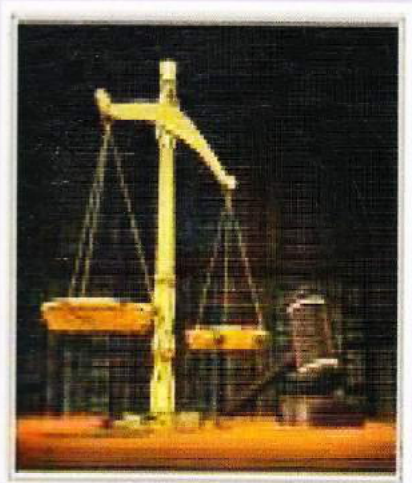


ISBN: 978 - 602 - 8540



**Bambang Haryadi**

# **POLITICAL ECONOMY OF SHARIAH ACCOUNTING**

**“Membangun Teori  
Ekonomi Politik Akuntansi Syariah”**

**Political Economy of Shariah Accounting**

**"Membangun Teori Ekonomi Politik Akuntansi Syariah"**

**Bambang Haryadi**

**Diterbitkan:  
Pascasarjana Universitas Brawijaya  
Malang  
2010**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT tas terselesaikannya penyusunan bahan ajar ini. Sungguh hanya semata karena rahmat dan barakahNya lah pekerjaan ini dapat kami rampungkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan bahan ajar ini masih perlu penyempurnaan dan pengembangan di kemudian hari. Oleh karena itulah maka kami senantiasa mengharap kritik dan saran membangun demi kesempurnaan bahan ajar ini.

Terakhir kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mendukung dan membantu terelesaikannya bahan ajar ini. Terkhusus karya ini kami persembahkan kepada Sita, Alma, dan Alya yang selalu setia menemani kala suka dan duka dalam proses penyusunan ini.

Harapan kami semoga bahan ajar ini dapat menjadi bagian literatur bagi para pembaca dan menambah khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia.

Bambang Haryadi

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1: EKONOMI NEO KLASIK</b> .....	1
1.1. Ekonomi Neo-Klasik .....	1
1.2. Kritik Atas Konsep Ekonomi Neo Klasik .....	5
<b>BAB 2: EKONOMI POLITIK</b> .....	10
2.1. Ekonomi Politik Klasik Solusi Atas Kelemahan Neo Klasik .....	10
2.2. Ekonomi Politik Sebagai Konsep Tanpa Batas Disiplin .....	12
2.3. Ekonomi Politik Sebagai Alat Menginterpretasi Fenomena .....	14
2.4. Ciri-Ciri Ekonomi Politik .....	17
2.5. Pola Analisis Ekonomi Politik .....	20
2.6. Ekonomi Politik Sebagai Unit Sistem Sosial .....	22
<b>BAB 3: POLITICAL ECONOMY OF ACCOUNTING (PEA)</b> .....	25
3.1. Political Economy of Accounting (PEA) .....	25
<b>BAB 4: KONSTRUKSI PEA</b> .....	36
4.1. Konstruksi Political Economy of Shariah Accounting (PESA): Proses Internalisasi Nilai Tauhid Ke dalam Political Economy of Accounting (PEA) ...	36
4.2. Konsep Kepemilikan .....	40
4.3. Konsep Zakat .....	42
4.4. Konsep Keadilan .....	43
4.5. Konsep Pertanggungjawaban .....	48
4.6. Konsep Distribusi Kekayaan .....	49
4.7. Menggapai Political Economy of Shariah Accounting (PESA) .....	51
4.8. Karakteristik Political Economy of Shariah Accounting .....	56

## BAB 1

### EKONOMI NEO KLASIK

#### 1.1. Ekonomi Neo-Klasik

Perkembangan ekonomi neo klasik dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran akan peran gereja yang terlalu intervensi dan bahkan berlebihan terhadap kegiatan individu sehingga dirasakan hilangnya kebebasan setiap individu pada masyarakat Eropa. Kondisi ini semakin menyadarkan masyarakat waktu itu untuk lebih mengurangi intervensi tersebut dikarenakan jika terus terjadi maka perkembangan ekonomi individu khususnya semakin mengalami penyusutan dan bahkan pembunahan aktivitas individu. Kebebasan menjadi harapan dan perjuangan bagi masyarakat Eropa waktu itu. Dengan adanya kebebasan atas intervensi inilah maka setiap individu akan dapat mewujudkan keinginan dan tujuan, termasuk dalam memperoleh tingkat kesejahteraan (Clark, 1998).

Perkembangan atas kegagalan peran negara dalam mengatur ekonomi masyarakat selanjutnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi neo klasik. Sebagaimana Clark (1988) menjelaskan bahwa pada waktu itu pandangan para pengusaha dan pemilik industri menunjukkan bahwa pihak pemerintah mampu menjadi regulator yang mampu mengintrodusir sesuatu kebijakan dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama kepada pedagang dan pemilik industri. Bahkan ada anggapan sebaliknya bahwa pemerintah justru dianggap sebagai pihak yang membatasi atau bahkan menjadi penghalang bagi para pengusaha dalam meningkatkan kekayaan.

Berdasarkan realitas ini tampak bahwa hal tersebut menjadi dasar dari perkembangan mekanisme pasar sebagai instrumen ekonomi yang paling efektif dan efisien. Mekanisme pasar bagi pihak produsen akan dapat secara bebas mendapatkan bahan baku dan memproduksinya menjadi barang tanpa ada batasan. Pada bagian lain, sisi penawaran dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen menjadi tersedia dengan kuantitas banyak. Namun demikian dengan berbagai variasi produk yang ada menimbulkan kebebasan konsumen untuk menentukan pilihan atas produk yang dibutuhkan.

Teori nilai dan distribusi merupakan asumsi dalam konsep mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar ini hukum penawaran dan permintaan menjadi penentu harga relatif. Artinya bahwa jika harga yang ada dianggap lebih tinggi daripada biaya produksi dan laba yang didapatkan, maka merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke dalam pasar guna meningkatkan sisi penawaran, sehingga bisa menurunkan harga. (Caporaso dan Levine, 1994:46). Dengan perubahan menuju mekanisme pasar maka selanjutnya akan menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dikarenakan dengan mekanisme pasar maka kesejahteraan masyarakat dapat terjadi secara alamiah.

Berdasarkan konsep dan perkembangan yang ada, secara umum mekanisme pasar yang merupakan *trade mark* dari ekonomi neo klasik memiliki beberapa karakteristik metodologi yang menonjol dalam ilmu ekonomi yaitu positivisme dan saintisme. Metodologi ini mendukung cara pandang yang memusat pada persoalan materil, yang empirik dan kasat mata serta lebih mengutamakan variabel yang bisa diukur. Hal ini berarti bahwa variabel yang

tidak terukur dan tidak bisa dianalisis tidak bisa dimasukkan kedalam bagiannya. Dengan demikian maka berakibat pada banyaknya persoalan penting yang bersifat normatif diabaikan. Bahkan pendukung metodologi ini cenderung bersikap netral terhadap nilai-nilai etika dan moral, seperti keadilan. Karena itu, tidak mengherankan kalau persoalan pokok yang dibahas oleh para pembuat kebijakan yang berpikir atas dasar ilmu pengetahuan positivistik itu adalah persoalan bagaimana "memperbesar kue nasional". Terutama bagaimana meningkatkan kekayaan dan kemakmuran materil melalui penggalakan transaksi di pasar yaitu, akumulasi kapital melalui pasar dan ukuran keberhasilan juga berujud prestasi dalam mendorong pertumbuhan kapital.

Ideologi yang mendasari ilmu ekonomi neo klasik itu juga mengajukan asumsi khas tentang hakekat manusia. Dimana manusia dipandang semata-mata sebagai "makhluk ekonomi" yang berperilaku seperti "*utility-maximizing machine*" (mesin yang berfungsi memaksimalkan keuntungan) dan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Manusia dianggap hanya akan bergerak kalau kepadanya ditunjukkan "iming-iming" yang sifatnya materil. Inilah yang mendasari munculnya kebijakan publik yang dalam praktek membanjiri warga masyarakat dengan kepuasan materil, dengan harapan kepuasan itu akan menimbulkan ketenangan. Sedangkan hal yang dilupakan adalah perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh akhlak, moralitas dan pertimbangan etika.

Terakhir, pendekatan ekonomi neo-klasik itu juga mengembangkan sikap yang khas mengenai organisasi dan lembaga sosial. Lembaga sosial yang paling diutamakan adalah pasar, sedangkan organisasi dan lembaga sosial lain

dianggap "given", yang paling penting adalah mekanisme pasar. Karena itu, mereka yang memiliki modal dan melibatkan diri dalam kegiatan pasar akan menentukan apa yang akan terjadi dalam proses ekonomi. Negara berperan mendefinisikan dan melindungi hak milik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar.

Hal yang menarik kemudian adalah pandangan kaum ekonom neo klasik mengenai keluarga. Dalam ideologi ini, keluarga (rumah tangga) dipandang sebagai lembaga sosial yang berperan ganda. Pertama, sebagai rumah tangga yang berfungsi sebagai mesin yang diprogram untuk memaksimalkan kepuasan dengan mengkonsumsi barang yang diproduksi secara massal oleh perusahaan. Semakin getol rumah tangga mengkonsumsi barang dan jasa itu, semakin "maju" ekonomi itu, demikian argumennya. Kedua, rumah tangga juga berfungsi sebagai produsen input abstrak yang disebut "tenaga kerja". Cara menyebut tenaga kerja dengan sebutan "sumberdaya manusia" juga memuat unsur ideologi kapitalistik itu. Istilah ini sebenarnya muncul dalam lingkungan pabrik. Di sana bisa ditemui mesin (sumberdaya fisik) dan manusia yang menanganinya (sumberdaya manusia). Status keduanya pada dasarnya disamakan, yaitu sebagai sumberdaya. Karena itu upaya memenuhi keperluan buruh seringkali berujud upaya memenuhi kebutuhan manusia sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh. Sebagai sumberdaya, manusia memerlukan ketrampilan, lapangan kerja, upah minimum yang memadai, dan sebagainya. Karena semata-mata dipandang sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh, ia dianggap tidak memerlukan pemenuhan hak sebagai manusia



utuh, misalnya hak untuk berserikat dan hak-hak lain demi pengembangan identitas dirinya (Muchtar, 2002).

Berkenaan dengan pengaruh teori ini terhadap realitas ekonomi sebagaimana hasil penelitian Hoogvelt dan Tinker (1978) yang menilai pengaruh teori ekonomi neoklasik terhadap praktek akuntansi dengan cara menilai kinerja keuangan perusahaan multinasional. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa di negara-negara miskin kinerja keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh aspek politik yang ada di negara tersebut. Selain itu penelitian lanjutan sebagaimana dilakukan terhadap perusahaan multinasional pertambangan yaitu Delco (Inggris) dan direlasikan dengan kontroversi yang terjadi di Cambridge University tentang kritik Piero Sraffa terhadap teori ekonomi neoklasik (marginalisme) pada tahun 1962, maka disimpulkan bahwa teori yang mendasari praktek akuntansi dipengaruhi teori neoklasik (marginalisme). Berdasarkan fungsi produksi dalam teori ekonomi neoklasik (marginalisme) pemilik modal akan memperoleh porsi distribusi pendapatan yang lebih banyak daripada yang didapatkan oleh tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori dan juga praktek akuntansi sarat dengan nilai-nilai marginalisme (Tinker, 1980).

## **1.2. Kritik Atas Konsep Ekonomi Neo Klasik**

Dalam perkembangan ekonomi neo klasik telah banyak mendapat kritik dari para pakar. Fakta "kegagalan pasar" dalam seluruh aspeknya, sebenarnya kini telah luas diakui. Kecuali tentu bagi para ekonom kolot dan bebal, mereka tetap ngotot bahwa pasar betapapun tidak sempurnanya masih bermanfaat untuk mengalokasikan kelangkaan sumber daya secara efisien. Menurut premis dasar aliran neo-klasik ini (baik yang Keynesian maupun kaum "*Moneterist*"),

barometer pasar: seperti tingkat harga, besar upah, tingkat suku bunga, pendapatan nasional, dan lain sebagainya, masih mencerminkan perubahan-perubahan "permintaan-penawaran." "Teori keseimbangan umum" yang menjadi dasar terbentuknya mekanisme pasar serta kekuatan tawar-menawar antar orang dalam sebuah sistem ekonomi, masih terus digunakan untuk menjelaskan, menganalisa, bahkan merencanakan perekonomian (Wiboyo, 1988).

Bagi kaum neo-klasik yang "*moneterist*", persaingan bebas merupakan doktrin yang mesti dijunjung tinggi, peran negara hanya akan membuat mekanisme pasar terdistorsi sehingga alokasi sumber daya secara efisien tidak terjadi. Sementara, walaupun mengkritik para pembela "mekanisme pasar" dengan menganjurkan campur tangan negara untuk merangsang kegiatan ekonomi karena kekuatan pasar tidak berjalan sebagaimana dibayangkan (pasar tidak sempurna), para pengikut Keynes tetap berdiri pada asumsi dasar yang hampir sama dengan para penganut mekanisme pasar, yakni dipertahankannya preferensi subyektif dari para pelaku ekonomi. Perbedaan di antara mereka hanya terletak pada penekanan sisi permintaan atau penawaran serta lingkup atau cakupan di mana analisa ekonomi harus dilakukan. Ekonom neo-klasik lebih menekankan sisi penawarannya (*ekonomi mikro*, teori produktivitas marjinal, teori harga serta penawaran uang, dan sebagainya), sedangkan pengikut Keynes lebih menekankan sisi permintaannya (*ekonomi makro*, permintaan agregat: tingkat upah, tabungan, investasi, dan sebagainya).

Terdapat premis dasar dan pra-andaian dari ekonom neo-klasik maupun Keynesian di mana pengandaian-pengandaian yang menjadi landasan teori mereka pada kenyataannya sudah tak dapat lagi menjelaskan kenyataan konkrit

yang dihadapi saat ini. Pada tingkat "dunia", sejarah masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa sehingga landasan teori ekonomi neo-klasik yang bermula di abad ke XVIII maupun "revisi" terhadapnya (Keynesian) di tahun-tahun 1930-an, ternyata harus dipertanyakan relevansinya dengan kenyataan sosial yang ada sekarang.

Beberapa kritik atas ekonomi neo klasik secara umum sebagaimana disampaikan oleh Wiboyo (1988) berkenaan dengan hal berikut. Pertama, hubungan pertukaran, baik pada tingkat agen-agen, prinsipal, perusahaan, kelompok, antar wilayah ataupun negara. Kegiatan pertukaran ini dilakukan oleh semua pihak untuk memperoleh manfaat. Dalam keadaan tertentu, yang dipostulatkan oleh pengandaiannya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan pertukaran barang maupun jasa tersebut akan memperoleh manfaat sesuai dengan "*preferensi subyektif*" masing-masing orang. Melalui mekanisme harga, memungkinkan hubungan produksi (sebagai kasus khusus dari pertukaran tak langsung) dipadukan ke dalam hubungan pertukaran. Dengan demikian dalam paham ekonomi neo-klasik, *nilai ekonomi muncul karena interaksi antar individu yang terpisah dari hubungan produksinya dan tidak mengakar pada nilai kerjanya*. Hubungan pertukaran komoditi berlangsung menurut preferensi subyektif setiap individu, yang diungkapkan sebagai suatu urutan konsisten dari sejumlah komoditi yang dianggap *tersedia* di satu pihak, dan *langka* di pihak lainnya. Dari mana asal usul individu ini? Bagaimana setiap individu mampu melakukan pertukaran? Apakah dasar dari preferensi individu itu? Dan, oleh otoritas siapakah "bakat, citra dan karsa" diberikan? Seluruh pertanyaan ini dipandang tidak relevan oleh paham mekanisme pasar.

Kedua, Hubungan pertukaran selalu berada dalam keseimbangan umum. Jika muncul ketidakstabilan di dalam interaksi permintaan-penawaran, maka dipostulatkan ketidakstabilan itu akan tetap menuju kepada keseimbangan umum, entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam kenyataan ekonomi, terbukti bahwa ketidakseimbangan pasar (distorsi harga, inflasi ataupun stagnasi) sering berlangsung tanpa henti. Resesi ekonomi 1870-an, depresi besar 1930-an dan stagflasi yang berlangsung sekarang ini, membuktikan bahwa teori "*general equilibrium*" tidak mampu menjelaskan krisis ekonomi yang berkepanjangan, karena dalam konjungtur atau "*business cycle*" jangka panjang keadaan ketidakseimbangan lebih dominan ketimbang keseimbangan.

Ketiga, preferensi (*subyektif*) kekuatan yang selalu sama. Jika terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik (monopoli, oligopoli) maka hal ini akan diabaikan, atau dianggap tidak berlaku. Sementara itu, skala preferensi biasanya dianggap sebagai "nomor urut". Meskipun dalam kurva-kurva isokuan teori "ekonomi mikro" dan teori "permainan" (*game theory*) misalnya, diperkenankan permodelan dengan bilangan kardinal, tetapi pertanyaan "preferensi itu didasarkan atas apa?" tidak pernah terjawab.

Terakhir, interaksi dan tanggapan para pelaku ekonomi berwatak rasional. Ukurannya adalah terukur, terbilang dan berada dalam kondisi kepastian yang mutlak. Jika terjadi irasionalitas, misalnya karena selera konsumen tidak sesuai dengan penawaran, maka model ekonomi neo-klasik ini menganggapnya sebagai "*patologis*" atau tak sesuai. Justru dalam kondisi perekonomian dewasa ini, akan selalu mengalami kasus di mana "*rational expectation*" tak dapat dilakukan. Contoh kasus menurunnya harga minyak dunia pada dasawarsa 80-an

merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dari perkiraan pada awal dasawarsa 1970-an.

Sementara itu Tinker (1980) melakukan kritik atas penerapan ekonomi neo klasik berkenaan dengan praktek akuntansi. Tinker menyimpulkan bahwa teori ekonomi neo klasik dan praktek akuntansi khususnya sarat dengan nilai-nilai marginalisme, sehingga distribusi pendapatan atas terjadinya aktivitas ekonomi di suatu negara yang disokong oleh korporasi terbukti lebih banyak menguntungkan pihak *stakeholder* dibandingkan dengan tenaga kerja.

Hal itu dipertegas oleh Tinker (1980:151) dalam analisis fungsi produksi dalam perekonomian negara. Menurut hasil pengamatannya menunjukkan bahwa kombinasi yang setara antara tenaga kerja (L) dengan modal (C) dalam menghasilkan pendapatan negara hanya berlaku pada saat proses menghasilkan output nasional. Oleh karena itu, kesetaraan tersebut tidak berlaku pada saat dilakukan distribusi pendapatan nasional. Berdasarkan fungsi produksi dalam teori ekonomi neoklasik (marginalisme) tersebut, pemilik modal (C) memperoleh porsi distribusi pendapatan nasional yang lebih banyak daripada yang didapatkan oleh tenaga kerja (L).

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa dalam ekonomi neo klasik memiliki kelemahan yang mendasar khususnya jika dikaitkan dengan realitas yang ada dalam perkembangan dunia ekonomi. Oleh karena itu perlu ada sebuah landasan ekonomi yang lain yang bisa menjawab dengan lebih lapang dan jernih atas beberapa kelemahan mendasar tersebut. Ekonomi politik klasik (*Classical Political Economy*) sebagai hasil auto kritik atas teori ekonomi neo klasik oleh karena itu diharapkan mampu menjawab setiap kelemahan yang ada.

## BAB 2

### EKONOMI POLITIK

#### 2.1. Ekonomi Politik Klasik Solusi Atas Kelemahan Neo Klasik

Ekonomi politik klasik merupakan pendekatan alternatif yang sebenarnya memiliki akar sejarah yang lebih jauh ke belakang. Pendekatan ekonomi politik klasik memiliki fokus perhatian bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan, tetapi juga bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan "*who get what, when, how and how much*". Persoalan yang hanya bisa dipahami melalui pendekatan yang menggabungkan ekonomi dengan dimensi-dimensi sosial lainnya. Ekonomi politik klasik hadir sebagai pendekatan yang menggabungkan beberapa dimensi lain.

Berbeda dengan pendekatan neo klasik, ekonomi-politik mengandalkan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode impretivis dan instropektif, ekonomi politik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia.

Mengenai hakekat manusia, pendukung pendekatan ekonomi-politik klasik yakin bahwa perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh filantropi, moralitas dan pertimbangan etika. Kepentingan manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga diimbangi dengan rasa tanggungjawab sosial. Pasar, menurut pendekatan ekonomi-politik, bukan lembaga sosial yang paling penting. Banyak proses produksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga sosial lain, seperti keluarga dan birokrasi.

Sebagai misal, proses produksi beras, gula, baja, semen, mobil, dan berbagai produk penting lain di suatu negara ternyata tidak bertumpu pada mekanisme pasar. Bahkan beberapa keputusan birokratik atau beberapa yang lain dihasilkan hanya melalui pertemuan keluarga presiden. Karena itu, yang diutamakan oleh pendekatan ekonomi-politik adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan, dan manifesto sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi. Dalam praktek, lembaga-lembaga itu memang sering dipakai oleh banyak orang untuk memproduksi kemakmuran.

Sebagai pendekatan alternatif, teori ekonomi politik klasik sebagaimana digunakan dalam teori PEA oleh Tinker (1980) memang merupakan pendekatan yang menilai pesimistis terhadap konsep mekanisme pasar. Pendekatan teori ekonomi politik klasik lebih berupaya untuk mengombinasikan beberapa mekanisme ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam pandangan Smith bahwa mekanisme pasar bukanlah sesuatu yang salah karena mekanisme pasar tidak bertujuan untuk membuat ketimpangan kesejahteraan masyarakat, namun demikian bertujuan membebaskan masyarakat pada saat itu dari ketergantungan terhadap lembaga yang ada. Sedangkan di sisi lain, mekanisme pasar tersebut bukan mekanisme yang universal, sehingga harus ditopang oleh sebuah otoritas legal yang bisa mengambil alih atau setidaknya memperbaiki mekanisme pasar ketika mekanisme pasar tersebut tidak dapat berjalan secara sempurna.

Berpijak pada realitas inilah, para penganut ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang merupakan penerus mahzab radikal tersebut, secara rasional menganggap bahwa negara dalam hal-hal tertentu harus

berdampingan dengan pasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini bermakna bahwa ketika negara tidak bisa menjangkau aktivitas ekonomi tertentu, maka domain tersebut menjadi milik pasar; sebaliknya ketika terjadi kegagalan pasar atau telah menyangkut wilayah publik, maka negara wajib masuk untuk membuat regulasi atau dalam batas-batas tertentu ikut berperan sebagai pemain.

## 2.2. Ekonomi Politik Sebagai Konsep Tanpa Batas Disiplin

Ekonomi politik didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bersifat supradisiplin (*supradisciplinary approach*) atau melampaui batas-batas disiplin. Fokus analisisnya adalah pada setiap isu ataupun kebijakan, yang baik langsung atau tak langsung melibatkan kepentingan publik. Sudah barang tentu tergantung pada ruang lingkup dan kedalaman analisisnya, ekonomi politik bisa saja membicarakan isu-isu pada tingkat individu, kelompok ataupun gabungan dari keduanya dan analisis yang dilaksanakan itupun bisa menjangkau pada aras (level) mikro atau makro. Jadi ekonomi politik ini merupakan bidang kajian yang untuk sebagian besar diarahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan ekonomi politik pada dasarnya menyangkut keputusan-keputusan politik (*political decisions*) mengenai kondisi tertentu yang dihadapi oleh negara misalnya dalam kondisi ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan manusia.

Selanjutnya Uphoff dan Ilchman (1972) mengungkapkan bahwa ilmu sosial itu terkait erat tentang pilihan publik. Hal ini bersangkutan dengan hal-hal yang bersifat politis karena yang dibahas adalah persoalan penggunaan kekuasaan dan persaingan untuk memperoleh kewenangan kekuasaan itu dalam masyarakat. Terkait dengan ekonomi karena yang dibicarakan adalah alokasi



serta pertukaran sumber-sumber daya langka, baik sumber daya politik dan sumber daya sosial maupun sumber daya yang secara umum biasa dikategorikan sebagai sumber daya ekonomi.

Kajian ekonomi politik ini adalah untuk mengembangkan proposisi-proposisi mengenai kemungkinan hasil akhir dari proses pertukaran sumber-sumber, baik yang bersifat non ekonomis (sosial dan politik) maupun yang bersifat ekonomi. Jadi dapat dijelaskan secara rasional berbagai hal bukan saja mengenai bagaimana sebuah sistem-sistem ekonomi politik tertentu senyatanya bekerja, tetapi juga mengenai bagaimana sistem-sistem itu seharusnya bisa bekerja dan bagaimana sistem itu dapat diperbaiki kinerjanya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (*policy goals*) yang jauh lebih baik. Tujuan-tujuan kebijakan yang dimaksud misalnya, apakah dirumuskan secara umum untuk tercapainya kesejahteraan rakyat, kemakmuran, pemerataan (distribusi pendapatan) atautkah sekedar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pada aspek tujuan ini maka dengan mudah bisa melihat betapa sifat analitik, terapan dan evaluatif penilaian dari kajian ekonomi politik ini. Karena ciri evaluatifnya ini maka dengan sendirinya ekonomi politik menjadi suatu bidang kajian atau pendekatan yang mau tidak mau akan senantiasa bersinggungan dengan masalah sarat dengan nilai (*value loaded*), bukan bebas nilai (*value free*).

Lebih lanjut melalui kajian dengan menggunakan perspektif ekonomi politik akan dapat pula ditelusuri apa yang sekiranya menjadi alasan atau latar belakang pemikiran (*rationalitas*) dan apa agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) atau rejim yang berkuasa, sejauh hal

ini menyangkut masalah perhitungan biaya (*costs*) dan manfaat (*benefits*) dari kebijakan tertentu atau keputusan-keputusan yang telah diambil terhadap masalah atau sektor pembangunan tertentu.

Dengan menggunakan logika seperti ini maka ekonomi politik sebenarnya dapat pula dipandang sebagai studi atau analisis kritis mengenai aspek atau dimensi ekonomis dari setiap kebijakan publik (*the economy of public policy*). Dipandang sebagai kajian ekonomi atas kebijakan publik inilah maka biasanya ada sejumlah pertanyaan khas bermuatan politis yang selalu diajukan yaitu *who gains, who losses, and how* (Staniland, 1985).

### 2.3. Ekonomi Politik Sebagai Alat Menginterpretasi Fenomena

Dalam mengkaji fenomena pembangunan ekonomi termasuk keputusan-keputusan kebijakan pembangunan ekonomi dan di sektor bisnis senantiasa perlu berangkat dari pendekatan ekonomi politik (*political economy approach*). Tampaknya tidak cukup mengkaji persoalan pembangunan hanya bersandar pada pendekatan ekonomi saja sebagaimana banyak dilakukan oleh para ekonom.

Beberapa hal yang mendasari pertimbangan diatas adalah bahwa *pertama*, untuk mengetahui mengapa dan dengan cara bagaimana kebijakan pembangunan termasuk kebijakan ekonomi dan bisnis disuatu negara, dirumuskan dan kemudian diimplementasikan (dengan berbagai cara), tidak akan dapat memahami dengan benar jika hanya melihat dari satu sudut pandang - secara deterministik, seolah dengan itu lantas bisa memperoleh sebuah gambaran yang lengkap. Sebagaimana dipahami bahwa perumusan kebijakan pembangunan itu pada dasarnya merupakan proses politik dan lazimnya melibatkan beragam aktor (negara, birokrat, politisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat/LSM,

dan masyarakat). Masing-masing aktor tentu memiliki kepentingan tertentu, baik tersembunyi atau terang-terangan yang satu dengan yang lain dalam interaksinya mungkin bisa jadi saling berbenturan (*conflict of interest*).

Dalam dunia politik untuk mencapai hasil yang maksimal (*win-win solution*) para aktor dituntut untuk melakukan *trade-off* dalam berbagai bentuk negosiasi dan kompromi. Dengan demikian untuk memahami kebijakan pembangunan dengan benar perlu ditelusuri secara cermat perilaku, motivasi ataupun preferensi para aktornya sehingga diperoleh jawaban : *siapa memperoleh apa, berapa banyak, mengapa dan dengan cara bagaimana* dari kebijakan pembangunan yang berlangsung disuatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Dengan berpangkal tolak pada perspektif ekonomisme berarti, langsung atau tidak langsung telah mempanglimakan, sebab semata-mata menilai kebijakan pembangunan ekonomi sebagai fenomena ekonomi semata dan dengan menggunakan ukuran-ukuran serba ekonomi. Dengan demikian misal hanya melihat sebagai bagian integral dari proses alokasi dan pertukaran sumber daya langka (politik atau sosial). Sebaliknya juga hanya berpikir secara deterministik dan karenanya tidak akan memperoleh wawasan yang benar (*comprehensive*), jika melihat kebijakan pembangunan hanya secara politikisme atau hanya mempanglimakan faktor politik. Dengan cara pandang demikian berarti akan melihat fenomena kebijakan pembanguana itu dari sudut pandang politik semata. Secara sadar atau tidak hal ini akan mereduksi makna pembangunan, misalnya memperlakukannya sekedar sebagai persoalan diseputar kekuasaan atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat.

Pandangan yang agaknya cukup memuaskan adalah yang mensintesiskan keduanya. Dalam arti mensintesiskan dua perspektif yaitu dari perspektif politik dalam arti umum dan perspektif ekonomis. Pemikiran semacam ini secara akademis bisa diterima, logis dan seimbang. Keseimbangan itu bisa dicapai jika melihat fenomena pembangunan itu baik proses maupun dampaknya secara interaktif. Dalam konsep Staniland (1985) cara pandang yang bersifat interaktif ini mengandung arti bahwa hendaknya memperlakukan *politics and economics as being functionally distinguishable but involved in exchange and reciprocal influence*. Konsep senada juga dikemukakan Zald (1970) bahwa ekonomi politik sebagai *the study of the interplay of power, goals of power-wielders and productive exchange system*.

Dengan demikian dalam menyoroti dampak tertentu dari fenomena kebijakan pembangunan ekonomi semisal krisis ekonomi/moneter maka tidak memperlakukan sekadar sebagai persoalan yang berakar pada faktor ekonomi dan kemudian mencari upaya penyelesaiannya hanya dari segi teknis ekonomi, melainkan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dengan melihat hubungan tarik menarik (*interactive*) antara pengaruh faktor-faktor ekonomi (*productive exchange*) dan politik (*power*). Disinilah tampak arti penting dari pemanfaatan pendekatan ekonomi politik yang bersifat holistik sebagai alat analisis untuk mengkaji berbagai isu atau fenomena sosial, sejauh hal itu menyangkut persoalan proses kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam ilmu sosial yang relatif telah tua usianya pendekatan ekonomi politik menawarkan sebuah pandangan akademis yang cukup atraktif. Daya tarik pendekatan ekonomi politik itu terletak

pada cara memandang fenomena pembangunan atau perubahan sosial (*social change*) dari dua perspektif pertama ekonomi yaitu yang menyandarkan pada kekuatan pasar (*market mechanism*) dan kedua politik yaitu bersandar pada digunakannya mekanisme kekuasaan (*political mechanism*) yang analisis terhadap negara senantiasa dilakukan dengan cara melihatnya baik sebagai agency (aktor) maupun sebagai struktur. Dengan demikian secara metodologis, pendekatan ekonomi politik berusaha mencari kejelasan hubungan antara perilaku ekonomi dengan perilaku politik (Wahab:1999).

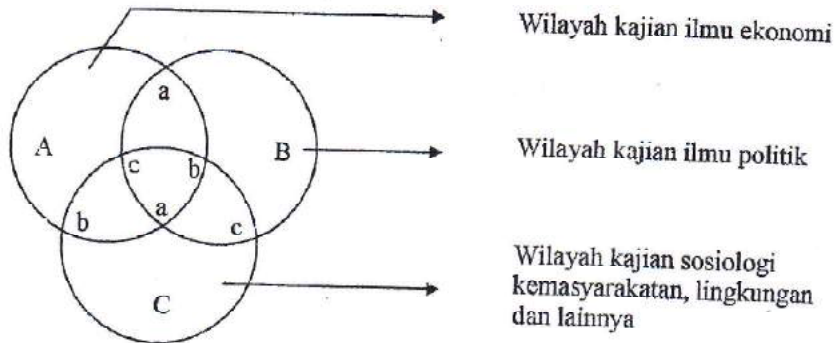
#### 2.4. Ciri-Ciri Ekonomi Politik

Disadari bahwa persoalan Ekonomi Politik Klasik sudah jauh berbeda dengan persoalan Ekonomi Politik masa kini. Sebabnya bahwa Ilmu Ekonomi Politik dengan paradigmanya yang baru tidak hanya terpaku pada bentuk dan fungsi pasar dengan model persaingan sempurna saja atau persaingan bebas dalam konsep Ekonomi Politik Konvensional yang teoritis dengan gambaran-gambaran abstrak belaka. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Politik Modern sudah sampai kepada persoalan berbagai faktor yang mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar domestik maupun internasional yang tidak semata-mata bersifat *pure* ekonomi belaka. Banyak hukum Ekonomi Konvensional khususnya yang sudah tertinggal di belakang layar. Bahkan hal-hal yang irasional, yang dikupas dalam studi Ekonomi Politik kontemporer pun turut pula mempengaruhi terbaliknya dalil-dalil Ekonomi Konvensional itu. Oleh karenanya, terlihat bahwa ekonomi politik modern amat fleksibel sebagai suatu *disiplin, kajian studi, pendekatan* atau *alat-alat analisis* yang dapat merambat ke bidang-bidang lain, yang justru sukar untuk dilakukan oleh disiplin-disiplin lain termasuk ilmu

ekonomi dan ilmu politik itu sendiri (Ikbar, 2006).

Pada dasarnya ekonomi politik merupakan serangkaian tali hubungan yang bersifat saling mempengaruhi atau saling berhubungan dan kait-mengkait di antara subjek dan objek dari variabel-variabel dasarnya terutama variabel-variabel yang berfaktor dari ekonomi, politik dan sosial masyarakat (Gambar 2.1). Dari ciri-ciri dan karakteristik khas yang tampak sekurang-kurangnya Ekonomi Politik memiliki (1) Sekurang-kurangnya ada unsur penggabungan dari dua atau lebih kutub utama keilmuan, yakni dalam hal ini Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik, yang secara timbal balik saling mempengaruhi dari interaksi dan tingkah laku masing-masing maupun proses mekanisme kerja keduanya, dan kemudian terjadi lagi umpan balik yang mengimbas pada masyarakat, (2) terdapat perspektif khusus dalam telahnya menyangkut usaha pemahaman terhadap sistem internasional kontemporer dalam konteks hubungan saling mempengaruhi antara tatanan sistem ekonomi internasional dan tatanan politik internasional yang rumit, indeterminasi (labil, tidak menentu dan penuh ketidakpastian), interdependensi keilmuan yang berbentuk interdisiplin dengan pendekatan yang bersifat eklektik, (3) ada usaha-usaha yang khas dari metode pendekatannya yang interdisipliner tersebut berupa telaah terhadap subjek negara dan bukan negara, juga objek masalah negara dan bukan melalui berlangsungnya suatu proses tertentu dari mekanisme pasar (tawar-menawar yang menentukan pada arus barang dan jasa) dengan faktor-faktor kekuasaan yang mempengaruhi atau sebaliknya, (4) kemudian bahwa keterlibatan pemerintah/negara berupa pelaksanaan kekuasaan/kekuatan politik dalam politik luar negeri, hukum (pengaturan-pengaturan)

**Gambar 2.1**  
**Batas dan Wilayah Kajian Ekonomi Politik**



Sumber: Ikbar, (2006: 23)

Keterangan:

- A = Wilayah kajian ilmu ekonomi
- B = Wilayah kajian ilmu politik
- C = Wilayah kajian sosiologi Kemasyarakatan, lingkungan dan lainnya
- abc = Ekonomi Politik
- a = sudut yang menjadi faktor hubungan timbal balik ke B,C,A
- b = sudut yang menjadi faktor hubungan timbal balik ke C,B, A
- c = sudut yang menjadi faktor hubungan timbal balik ke A, B, C

dan ketentuan-ketentuan nasional dan internasional diluar perspektif ekonomi, menjadi perhatian penting, (5) demikian pula dengan adanya peranan aktor bukan negara secara kontemporer kian meluas terutama menyangkut interaksi institusi dan personal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas ekonomi dan politik sebagai kekuatan diplomasi tawarnya (*bargaining position*) dengan aktor lainnya termasuk para pemimpin dalam hubungan internasional menyangkut masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, lingkungan, ekosistem, gender, globalisasi, demokratisasi, hak-hak azasi manusia, dan sebagainya, (6) bahwa wilayah kajian Ekonomi Politik secara komprehensif telah begitu meluas dan

melampaui batas-batas klasik negara-negara di dunia karena sumbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi serta transformasi sosial lainnya, (7) adanya telaah perspektif global khususnya menurut penstudi / kaum reformis dalam Ekonomi Politik menyangkut filosofis dasar keilmuan melalui cara *kausalitas*, *korelasional* dan *perkaitan* dari suatu peristiwa ekonomi dan politik, merupakan model penyederhanaan logis untuk menahami hubungan interaktif dan timbal balik, (8) ekonomi politik terbuka untuk suatu diskusi dan perdebatan keilmuan yang masih dipandang kontroversial baik oleh para pakar Ilmu Ekonomi konvensional maupun para pakar ilmu sosial lainnya.

#### 2.5. Pola Analisis Ekonomi Politik

Ekonomi politik berkaitan dengan seperangkat teori dan konsep yang berkenaan dengan mekanisme pasar, dalam hal ini dapat pula dipinjam dari ilmu ekonomi atau juga politik seperti kekuatan-kekuatan yang berperan dalam interaksi politik negara-negara satu dan lainnya. Begitu pula dengan subjek-subjek keilmuan lain. Sebagai ilustrasi, Politik Ekonomi Moneter dengan konsep *devaluasi*, merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menurunkan kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing tertentu. Sejumlah pertanyaan yang dapat dikemukakan menyangkut hal ini misalnya (1) mengapa pemerintah membuat kebijakan tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mendasarinya, (2) untuk apakah kebijakan itu dibuat dan bagaimana konfigurasi kebijakan tersebut, (3) sejauh manakah efek dan atau umpan balik yang timbul terhadap kehidupan masyarakat, (4) variabel-variabel yang berpengaruh atau yang dominan mempengaruhi terjadinya kebijakan tersebut serta, (5) hubungan kebijakan tersebut dengan fenomena lain yang ada.



Maka dengan pendekatan ekonomi politik persoalan tersebut dapat dianalisis dengan pola sebagaimana dalam Tabel 2.1. Implementasi konsep/teori ekonomi politik dapat diterangkan pada dua sisi, yang pertama analisis tidak akan terhenti dari sekumpulan variabel atau parameter ekonomi saja pada saat mencoba memahami suatu peristiwa ekonomi yang sedang terjadi. Upaya yang dilakukan adalah penyelidikan terhadap aktor-aktor atau unit politik/ekonomi yang terlibat dalam gerakan dari variabel tersebut sebagai faktor dependen atau independen sebagai subjek disamping mungkin pula struktur sosial dan lainnya yang menghubungkan masing-masing aktor.

Variabel disini adalah sekumpulan fakta dari sesuatu yang dihasilkan oleh sejumlah tindakan para aktor yang berada di belakang variasi-varian yang tengah dimatai/diperhatikan. Kedua adalah sisi lain bentuk aksi atau tindakan ekonomi yang diambil dari aktor-aktor itu saat dilakukan kegiatan politik. Bahwa dibelakang tindakan-tindakan politik oleh para aktor tersebut tentu terdapat motivasi untuk ekonomi sebagai landasan dari kegiatan atau aktivitasnya.

**Tabel 2.1**  
**Pola Analisis Ekonomi Politik**

Metode	Implementasi Konsep / Teori	Masalah Yang Dihadapi	Faktor-Faktor Berpengaruh
Pendekatan Ekonomi Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat analisis ekonomi politik dalam implementasi dan perspektif yang berasal dari teori politik untuk memahami ekonomi</li> <li>- Alat analisis ekonomi politik sebagai implementasi dari perspektif yang bersumber pada teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik dan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel-variabel politik</li> <li>Variabel-variabel ekonomi</li> <li>Variabel-variabel Sosial, budaya dan lain-lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervensi pemerintah</li> <li>- Perubahan kebijakan, tindakan politik ekonomi, dan lain-lain</li> <li>- Kenaikan harga-harga di pasar</li> <li>- Kemosrotan daya beli masyarakat</li> <li>- Langkanya sumberdaya dan lain-lain.</li> <li>- Revolusi sosial, transformasi Industrial</li> <li>- Reformasi dan kemajuan ilmu dan teknologi, komunikasi dan informasi</li> </ul>

Sumber: Ikbar, (2006: 31)

Dari analisis-analisis yang didasarkan atas kedua sisi tersebut terlihat unsur-unsur pengaruh, saling hubungan atau keterkaitan antara variabel-variabel. Misalnya bahwa akan terlihat faktor-faktor atau adanya sesuatu yang khas yang tidak terduga oleh analisis dalam ekonomi sebagai hal yang berpengaruh terhadap proses pembangunan atau dari faktor politik yang berpengaruh terhadap kehidupan pasar atau terhadap kehidupan ekonomi sosial/kemasyarakatan.

## 2.6. Ekonomi Politik Sebagai Unit Sistem Sosial

*Sistem sosial* di sini adalah *hubungan saling tergantung* antara apa yang disebut faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor bukan ekonomis. Faktor bukan ekonomis itu di antaranya ialah sikap-sikap masyarakat dalam menghadapi kehidupan, pekerjaan dan kekuasaan, struktur administratif dan birokrasi pemerintahan ataupun swasta, pola-pola pertanian keluarga dan keagamaan, tradisi kultural, sistem-sistem pemakaian tanah atau lahan, otoritas dan integritas badan-badan pemerintah tingkat peran serta keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pembangunan, fleksibilitas dan rigiditas (kekakuan) kelompok-kelompok ekonomi dan sosial masyarakat tersebut (Todaro, 1983: 47).

Sebagaimana disebut Todaro, perlu ditinjau secara seksama bagaimana sesungguhnya hubungan Ekonomi Politik yang juga merupakan suatu hubungan kesalingtergantungan antara faktor ekonomis dan faktor bukan ekonomis (*baca: politis*) dengan sistem sosial, yang juga mempunyai kepedulian yang besar terhadap sasaran pembangunan dan pemecahan masalah pembangunan atau pertumbuhan negara. Selain itu didapati banyak kekeliruan analisis ekonomi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari karena tidak memberikan proses penelaahan secara utuh tentang faktor-

faktor bukan ekonomi yang berpengaruh terhadap sistem ekonomi atau mekanisme ekonomi.

Tidak secara keseluruhan pengertian sistem sosial yang dipandang sebagai faktor bukan ekonomis yang berpengaruh atas kekuatan sistem, mekanisme, dan pemikiran-pemikiran ekonomi politik diamati. Namun, beberapa persoalan yang pada peringkat sosial patut diselidiki berkenaan dengan hubungan-hubungan antara ekonomi dengan aspek-aspek tertentu saja dari lingkungan socio-kulturnya yang di telaah, di antaranya (1) Faktor-faktor kebudayaan, khususnya mengenai peranan ekonomis dari nilai-nilai ideologi, (2) Hubungan ekonomi dengan berbagai bagian dari lingkungan politik dalam perspektif struktur politik, kekuasaan dan kelompok kepentingan, (3) Faktor integratif menyangkut peranan ekonomis dari tipe kelompok solidaritas kekeluargaan dan kesukuan, (4) Faktor stratifikasi sosial berkenaan dengan peringkat personal, kedudukannya dalam lapisan masyarakat berpengaruh atas kehidupan ekonomi - atau saling mempengaruhi.

Sebagai sebuah sistem sosial maka secara umum dapat dipahami adanya pertalian erat antara dunia politik dan dunia ekonomi, tetapi sejauh manakah proses pendekatan multidisiplin atau lebih tepatnya pendekatan interdisiplin-nya mampu menerangkan kepada semua pihak tentang adanya hubungan yang signifikan antara keduanya itu. Bahkan pada sementara kalangan banyak yang menyangsikan eksistensi ekonomi politik karena mereka melihat ada kesukaran kaum intelektualnya untuk memecahkan masalah-masalah pertentangan radikal yang terjadi pada perspektif kedisiplinan induk, yakni ilmu ekonomi dan ilmu politik. Perbedaan mendasar terletak pada hakikat paradigma Ilmu Politik

yang menekankan pengkajian tentang kekuasaan/kekuatan (*power*), dan sebaliknya Ilmu Ekonomi pada mekanisme pasar (*market*) terutama oleh aliran bukan Marxian. Padahal, dari kedua disiplin akar itu terdapat "dialektika" yang ekstrem untuk dipadukan karena kompleksitas dan heterogenitas hubungan keduanya. Oleh karenanya dianggap banyak kegagalan yang dialami oleh para penstudi dan pakar-pakarnya dalam merumuskan teori umum (*grand theory*) yang dapat memuaskan segenap pihak.

## BAB 3

### POLITICAL ECONOMY OF ACCOUNTING (PEA)

#### 3.1. Political Economy of Accounting (PEA)

Political Economy of Accounting (PEA) merupakan salah satu dari pendekatan teori kritik (*critical theoretical approaches*). PEA ini pertama kali diperkenalkan oleh Tinker (1980) dalam artikelnya yang berjudul "*Towards a political economy of accounting: an empirical illustration of the cambridge controversies*". Sebagai penggagas PEA Tinker memiliki pandangan bahwa teori dan praktek akuntansi senantiasa akan dipengaruhi oleh teori tersebut. Namun demikian dalam realitasnya teori dan praktek akuntansi tersebut hanya dipandang dari aspek ekonomi saja sedangkan aspek lainnya tidak di libatkan didalamnya. Padahal menurut pandangan Tinker angka-angka akuntansi yang merupakan cermin dari hasil kinerja keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan merupakan refleksi dari situasi dan kondisi yang terjadi saat mulai disusun hingga berakhirnya penyusunan laporan keuangan. Situasi dan kondisi tidak hanya yang terjadi didalam internal perusahaan namun juga yang terjadi di eksternal perusahaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penelitian Tinker (1980, 1984, 1988) secara keseluruhan berupaya melakukan sebuah evaluasi atas aspek-aspek fundamental yang tercakup dalam pemikiran ekonomi neo klasik. Dia menifai bahwa didalam konsep pemikiran ini banyak terdapat kelemahan khususnya sebagai dasar dalam mengembangkan praktik akuntansi selama ini, dan selanjutnya diberikan suatu alternatif pemikiran dengan menggunakan *classical political economic* sebagai dasar dalam

mengembangkan praktik akuntansi. Harapan dari pendekatan alternatif ini (PEA) adalah bahwa dengan memahami kinerja perusahaan yang melibatkan perspektif politik dalam kerangka ekonomi politik maka akan dihasilkan sebuah analisis yang lebih komprehensif dan lebih tepat, dikarenakan setting politik yang ada pada saat menghasilkan kinerja keuangan turut pula diketahui sebagai dasar dalam menyusun kinerja tersebut. PEA mencoba untuk menghadirkan sebuah kajian yang menghubungkan antara perspektif ekonomi dan politik didalam menganalisis suatu realitas perusahaan berdasarkan informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan. PEA dengan demikian berupaya untuk memahami dan mengevaluasi fungsi akuntansi dalam konteks lingkungan ekonomi, sosial dan politik dimana akuntansi tersebut di terapkan.

Tinker (1980) sebagaimana diringkas dalam Tabel 3.1. dibawah selanjutnya menjelaskan adanya dua macam perbedaan antara ekonomi neo klasik dan ekonomi politik klasik. Perbedaan pertama berkaitan dengan masalah laba, dimana pada teori ekonomi politik klasik laba dimaknai sebagai tingkat pengembalian modal (*return to capitalists*) kepada pemilik modal. Sedangkan pendekatan ekonomi neo klasik mengartikan laba sebagai indikator dari efisiensi produksi. Dalam ekonomi neoklasik (*marginalisme*), tenaga kerja diposisikan sebagai bagian dari pemilik modal, dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukan pekerja merupakan tindakan bersama dalam rangka mencapai efisiensi yang telah ditargetkan.

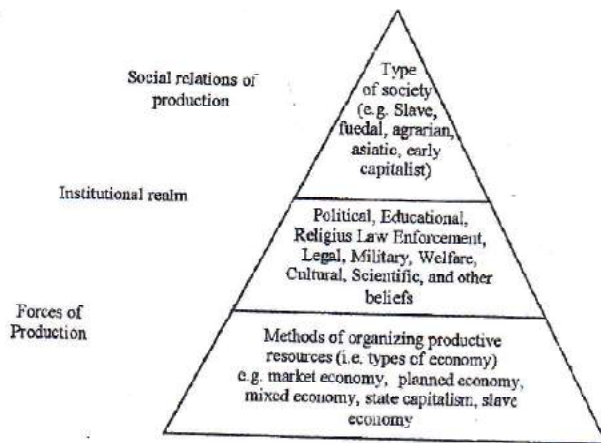
**Tabel 3.1**  
**Pemaknaan Laba**

	Neo Classical Economics (Marginalism)	Classical Political Economy
Pemaknaan laba	Merupakan indikator dari efisiensi ekonomi	Pengembalian modal
Penjelasan teori atas penentuan tingkat laba	Teori produktivitas marginal memfokuskan pada kekuatan produksi	Analisis politik dan sosial yang memfokuskan pada hubungan sosial dari produksi

Sumber: Tinker, (1980: 148)

Pemahaman laba diatas mengandung maksud bahwa efisiensi yang sebenarnya merupakan tujuan akhir pengembalian modal pemilik menjadi sebuah pemahaman sebagai tujuan bersama yang harus dicapai oleh seluruh bagian dalam perusahaan. Namun sebaliknya dalam teori ekonomi politik klasik laba merupakan tingkat pengembalian kepada pemilik modal. Selain itu, dalam penentuan tingkat laba dikarenakan laba merupakan indikator dari efisiensi produksi maka dalam teori ekonomi klasik laba dipahami sebagai perhitungan selisih antara jumlah input dibandingkan jumlah output dalam proses produksi.

Berdasarkan pemahaman ini, maka untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi, maka perlu dilakukan cara untuk menekan biaya faktor produksi maupun kuantitas faktor produksi dalam rangka pencapaian return dari pemilik modal. Adapun menurut pemahaman dalam teori ekonomi politik klasik penentuan tingkat laba diperoleh dengan cara lebih memfokuskan pada relasi sosial dalam proses produksi di perusahaan. Artinya bahwa penentuan laba tidak semata-mata memandang dari selisih input dan output namun namun lebih luas hingga pada seberapa jauh hubungan sosial yang timbul dari adanya proses produksi dalam sebuah perusahaan.



Gambar 3.1  
Dua Konsep dan Keterkaitan Modal  
Sumber: Tinker (1980: 153)

Perbedaan kedua menyangkut masalah modal sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.1. Dalam gambar dijelaskan bahwa menurut teori ekonomi politik modal memiliki dua dimensi yaitu, sebagai instrumen dari produksi dan kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lain dalam organisasi sosial. Dalam teori ekonomi politik dimensi modal pertama merupakan pemaknaan modal sebagai sebuah kekuatan dari ekonomi (*economic force*) dalam melakukan proses produksi. Sedangkan dimensi kedua dijelaskan pengertian modal sebagai proses hubungan-hubungan sosial dari produksi (*the social relations of production*). Dimana hubungan-hubungan sosial dari produksi ini bisa direfleksikan dari adanya keragaman lembaga sosial yang ada antara lain lembaga hukum, negara, pendidikan, agama, politik, sosial dan lembaga administrasi negara). Keberadaan lembaga-lembaga sebagaimana disebut diatas sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap manusia dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Seluruh hal diatas dapat menentukan dan mewarnai atas sistem ekonomi yang akan digunakan. Perbedaan berbagai macam kehidupan sosial (feodal, kapitalis, perbudakan dan lainnya) dicirikan dengan berbagai macam hubungan sosial yang berbeda dan oleh karena itu maka terdapat pengaturan institusi yang berbeda pula. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa memahami proses sosial dan politik (hubungan sosial) dibutuhkan untuk menginterpretasikan kinerja ekonomi secara lebih komprehensif. Artinya bahwa dengan pemahaman seperti ini, maka sekaligus ingin menegaskan kembali bahwa mekanisme pasar bukanlah mekanisme yang paling efektif dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga-lembaga yang dapat mengakomodir dan menjamin hak kepemilikan manusia.

Adapun Cooper dan Sherer (1984) meneliti tentang nilai dari laporan keuangan perusahaan dalam perspektif PEA. Hal yang melatarbelakangi riset Cooper dan Sherer ini adalah bahwa berdasarkan analisis ternyata laporan keuangan dikembangkan lebih banyak disusun untuk memenuhi kepentingan segelintir pemilik modal saja dan cenderung mengabaikan kepentingan dari stakeholders lainnya. Selanjutnya Cooper dan Sherer berupaya mencoba untuk merubah pola kajian dengan memasukkan nilai-nilai lain selain ekonomi untuk mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sesungguhnya laporan akuntansi suatu perusahaan (negara) dikembangkan. Oleh karena itulah maka PEA dirasa sangat pas untuk diterapkan mengingat PEA juga mengedepankan riset akuntansi dalam konteksnya.

Sehubungan dengan itulah maka Cooper dan Sherer (1984:217) memaknai PEA sebagai pengertian secara makro dan secara mikro. Secara makro

PEA ditempatkan sebagai kerangka pikir untuk merekonstruksi teori akuntansi. Dengan cara inilah maka nilai-nilai ekonomi neoklasik bisa tergantikan dengan nilai-nilai yang melekat pada teori ekonomi politik klasik. Adapun pada pengertian secara mikro PEA ditempatkan sebagai metodologi yang berfungsi menelaah secara kritis kinerja korporasi, baik dilihat secara internal maupun relasinya terhadap struktur kekuasaan negara dan juga global. Selain itu PEA juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang hubungan ekonomi politik berdasarkan data-data akuntansi dari berbagai perusahaan pada suatu negara ataupun lintas negara, selain itu bisa menjadi instrumen untuk menilai proses distribusi kesejahteraan dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Dengan demikian maka PEA akan lebih mudah jika dimanfaatkan dalam memberikan kontribusi besar untuk membuat sebuah rekonstruksi secara komprehensif dan rasional terhadap sebuah teori akuntansi yang berlaku saat ini.

Selanjutnya Cooper dan Sherer (1984:218-219) mempunyai pandangan bahwa PEA memiliki karakteristik antara lain pertama, bahwa dalam studi akuntansi perlu mengakui keberadaan kekuasaan dan konflik dalam masyarakat berkenaan penilaian kinerja perusahaan (akuntansi). Dengan demikian maka dapat dipahami bagaimana distribusi pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan di dalam masyarakat itu bisa terjadi. Artinya bahwa pemahaman ini bertolak belakang dengan pemahaman dalam ekonomi neo klasik khususnya dimana kinerja korporasi dianggap hanya sebagai aktivitas ekonomi semata dan terpisah dari aktivitas lain. Dengan pemahaman realitas menurut PEA ini maka bisa digunakan sebagai alat analisis yang lebih komprehensif jika digunakan sebagai

alat analisis hubungan ekonomi politik dan juga distribusi pendapatan atas perusahaan negara khususnya.

Karakteristik kedua adalah bahwa PEA juga mendorong penelitian-penelitian dibidang akuntansi sesuai dengan konteksnya. Artinya bahwa dalam penelitian akuntansi diperlukan pemahaman akan ekonomi politik serta kondisi sosial dimana akuntansi berada dan dipraktekkan. Dengan kata lain bahwa PEA berusaha menganalisis bagaimana sejarah dan proses yang berjalan hingga suatu kegiatan perusahaan bisa muncul. Hal ini dikarenakan struktur kekuasaan tidak akan bisa mempengaruhi perusahaan ketika tidak ada aturan main (regulasi, baik secara formal maupun secara informal) yang dapat dijadikan alas oleh korporasi dalam aktivitas operasionalnya. Selain itu, ketiadaan aturan main juga akan mengaburkan distribusi pendapatan atas kinerja maksimal korporasi. *Political economy of accounting* akan memperlakukan nilai sebagai bagian yang sangat esensial, dimana laporan akuntansi diterapkan dalam kepentingan tertentu (misalnya kelompok elite atau klas tertentu). Pandangan nilai sosial laporan akuntansi Cooper dan Sherer (1984) ini menyatakan bahwa riset akuntansi senantiasa perlu mencerminkan konteks sosial, ekonomi dan politis di mana akuntansi diterapkan. Kegagalan untuk mempertimbangkan konteks ini akan mendorong penekanan desain laporan akuntansi yang mengutamakan kepentingan pemegang saham, dan tidak mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan karakteristik ketiga adalah bahwa PEA akan lebih mendorong pemahaman fungsi akuntansi yang lebih dinamis dalam masyarakat dan menganggap bahwa terjadi saling mempengaruhi antara akuntansi dan

lingkungannya. Dengan kata lain bahwa kebijakan akuntansi senantiasa dilandasi oleh motivasi yang ada pada dalam diri manusia. Pemahaman ini merupakan hal yang penting, karena pertimbangan mengenai motivasi manusia dalam memperoleh kesejahteraan dan akumulasi kekayaan.

Perspektif *political economy of accounting* selanjutnya juga digunakan dalam menelaah reformasi akuntansi di Indonesia oleh Rosser (1999). Hasil analisis menyatakan bahwa di negara berkembang umumnya dan di Indonesia pada khususnya sistem akuntansi cenderung diasumsikan tidak bisa lepas dari karakter barat. Hal ini sesuai pandangan sarjana perspektif *neoclassical/modernisasi* yang menyatakan bahwa negara berkembang akan bergeser menjauh dari praktek akuntansi tradisional ke arah barat karena tidak cocok dengan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kompleksitasnya yang cenderung meningkat.

Dikarenakan negara berkembang menduduki posisi subordinat dalam sistem ekonomi global, maka realitasnya perusahaan-perusahaan hanya mempunyai sedikit pilihan untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang mampu melayani kepentingan dari perusahaan-perusahaan negara barat dan *multi national*. Sedangkan pilihan-pilihan untuk kepentingan nasional relatif lebih banyak. Oleh karena itu pilihan atau langkah yang ditempuh dengan melakukan adopsi kebijakan akuntansi barat daripada mengembangkan kebijakan yang ada.

Realitas menunjukkan bahwa sulit untuk menghindari muncul model sistem akuntansi barat di negara berkembang. Realitas seperti kasus di Indonesia, banyak negara berkembang mengadopsi regulasi akuntansi barat, terutama IAS, dalam rangka untuk mengakses pasar uang global. Sepanjang negara berkembang

memerlukan modal dari pasar, maka akan mencoba melakukan sesuatu untuk meningkatkan mutu akuntansi keuangan di negaranya dengan standar barat yang dibutuhkan pasar global. Padahal pemerintah negara berkembang berada dalam kepentingan sosial dan politis domestik mereka sendiri. Reformasi sistem akuntansi dalam negeri namun dengan menggunakan sistem akuntansi menurut standard barat.

Hasil lain dalam kasus Indonesia menunjukkan bahwa pengenalan standar akuntansi internasional (IAS) nampaknya hanya memiliki sedikit pengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan menerapkan sistem akuntansi dengan model barat, maka negara berkembang tidak hanya sekedar memperkenalkan regulasi akuntansi barat saja namun ternyata diperlukan adanya perubahan politis secara mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara. Hal ini mengandung makna bahwa dengan melakukan perubahan politis secara mendasar atas struktur ekonomi maka berdampak pada marginalisasi atas kepentingan sosial dan politis dalam negeri suatu negara demi melayani kepentingan perusahaan multinasional.

Irianto (2004) menggunakan telaah dari perspektif *political economy of accounting* (PEA) dalam mengkaji pelaksanaan privatisasi di perusahaan BUMN di Indonesia yaitu PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Hasil penelitian yang cukup menarik adalah bahwa dalam kasus proses privatisasi di Indonesia ternyata informasi akuntansi telah digunakan baik oleh pihak yang mendukung maupun dengan pihak yang menentang kebijakan privatisasi pada salah satu BUMN di Indonesia. Dalam kasus tersebut ternyata masing-masing pihak menggunakan

pendekatan dan "angka-angka akuntansi" yang berbeda-beda dalam rangka memberikan justifikasi atas argumen masing-masing.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan privatisasi BUMN tujuan lain privatisasi sebagaimana dalam master plan reformasi BUMN 1998 yaitu distribusi kepemilikan perusahaan yang mengandung makna perlu adanya distribusi kepemilikan perusahaan kepada masyarakat secara adil dan jujur belum dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana dan seksama didalam implementasinya. Hal ini terbukti bahwa dalam proses privatisasi PT. Semen Gresik (Persero) dalam tiga periode yaitu pada tahun 1991, 1995 dan 1998, ternyata telah terjadi oposisi yang kuat dengan munculnya hegemonic MNCs dari berbagai stakeholders yaitu Lafarge (Prancis), Cemex (Mexico), Heidelberger Group (German), Holcim/Holderbank (Swiss) dan Blue Circle (Inggris). Selanjutnya dalam realitasnya hanya terdapat 7 perusahaan yang menguasai industri semen di tanah air. Dari sejumlah perusahaan tersebut ternyata 3 perusahaan telah mampu menguasai kapasitas terpasang semen di Indonesia hingga mencapai 90 persen lebih. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri semen di Indonesia sangatlah tergantung dari kinerja ketiga perusahaan ini.

Hasil lain penelitian Irianto (2004) menunjukkan bahwa ternyata proses privatisasi BUMN di Indonesia telah gagal mengedepankan peran sentral dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak seperti di Inggris Nation Audit Office (NAO) memiliki peran utama dalam melakukan evaluasi tentang "*how well and to what extent government departments have met their objectives for individual privatisations*" (Wright and Thompspon, 1994)

Bushmana dan Piotroskib (2006) melakukan riset untuk mengetahui pengaruh institusi hukum dan politik dalam laporan keuangan. Dengan perspektif *Political Economic of Accounting* (PEA) peneliti menemukan hasil riset yang menunjukkan bahwa ternyata sistem legal/judicial, undang-undang pasar modal, ekonomi politik, dan rejim pajak suatu negara mampu menciptakan insentif yang mempengaruhi perilaku para eksekutif perusahaan, investor, regulator dan pelaku pasar lainnya. Selanjutnya sebagaimana insentif membentuk properti dari angka-angka akuntansi yang dilaporkan, melalui sifat saling mempengaruhi secara kompleks dari standard akuntansi, undang-undang, pasar, regulator, dan tekanan politis, serta pertimbangan pelaporan yang dilakukan oleh para manajer.

## BAB 4

### KONSTRUKSI POLITICAL ECONOMY OF SHARIAH ACCOUNTING

#### 4.1. Konstruksi Political Economy of Shariah Accounting (PESA) : Proses Internalisasi Nilai Tauhid Ke dalam Political Economy of Accounting (PEA)

Dipahami bahwa dalam konsep *Political Economy of Accounting* (PEA) masih memiliki nuansa sistem kapitalisme. Hal ini bisa diamati dari konsep keadilan dan distribusi yang tercakup didalamnya masih mengandung nuansa pemarginalan pihak-pihak yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. PEA sementara ini masih bersifat duniawi dan belum memiliki konsep Tauhid (Slamet,2001:265). Oleh karena itu agar supaya lebih luas cakupannya yaitu bisa mengakomodir pihak-pihak tersebut di atas serta juga urusan duniawi juga akhirati maka diperlukan pengembangan dengan memasukkan nilai-nilai syariah.

Dalam memahami fenomena kinerja perusahaan misalnya, PEA masih terperangkap dalam posisi pihak-pihak yang langsung berkepentingan dengan perusahaan. PEA melupakan adanya pihak lain yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai penilaian dan pertimbangan dalam memahami sebuah fenomena. Pemahaman dan penilaian atas fenomena juga lebih banyak didasarkan terhadap hal-hal yang bersifat materi saja, misalnya menilai kinerja dari aspek keuangan saja, menilai keberhasilan dan kontribusi materi yang diterima dan masih banyak lagi yang seluruhnya diarahkan dalam nilai-nilai materi.

Keadilan dalam konsep PEA konvensional hanyalah keadilan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan perusahaan dan selalu diukur dari nilai-nilai materi. Adil jika setiap pihak yang berhubungan langsung dengan



perusahaan telah memperoleh hak-haknya dengan layak dan sewajar. Dikatakan telah memenuhi rasa keadilan jika perusahaan telah memenuhi dan memberikan kenikmatan (hak-hak) materi kepada setiap pihak yang langsung berhubungan dengan perusahaan. PEA telah menafikan keberadaan pihak yang tidak berkontribusi pada perusahaan, menafikan nilai non materi yang melekat dalam diri manusia seperti perasaan, kepuasan batin, kebebasan, kesenangan, kebebasan, ketenangan, kedamaian, ketentraman manusia (masyarakat). Nilai-nilai ini tidak bisa dikesampingkan bahwa selama ini telah menjadi ukuran "sang lain" bagi manusia dalam menilai sebuah kinerja perusahaan. Realitasnya banyak pihak menilai sebuah kinerja perusahaan tidak hanya dalam ukuran materi saja, ukuran non materi bahkan seringkali dijadikan ukuran dalam memahami dan menilai sebuah kinerja.

Konsep PEA menilai distribusi kekayaan dan beban sebatas dari sudut pandang pihak-pihak yang langsung berkontribusi terhadap perusahaan. Kekayaan suatu perusahaan dikatakan telah terdistribusi secara merata jika telah dibagi secara proposional kepada pihak yang berkontribusi langsung kepada perusahaan misalnya investor dan kreditur. Ukuran distribusi kekayaan yang merata dalam PEA dinilai dari pemerataan pendapatan yang diterima secara proposional oleh para pemilik modal dan pemberi kredit sebagai pihak yang berkontribusi langsung dengan perusahaan. Adapun pihak yang tidak berkontribusi kepada perusahaan misalnya tenaga kerja, masyarakat sekitar, alam atau lingkungan tidak menjadi pertimbangan dalam menilai pemerataan dalam distribusi kekayaan sebuah perusahaan. Dengan kata lain kekayaan perusahaan

tidak akan pernah terdistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak langsung tersebut karena mereka tidak memiliki kontribusi kepada perusahaan.

Pada gilirannya diperlukan sebuah pengembangan pendekatan yang mampu memahami fenomena kinerja perusahaan yang tidak memenjara dirinya pada posisi tertentu saja namun dalam posisi semua pihak baik yang langsung berkepentingan dengan perusahaan maupun pihak yang tidak langsung berkepentingan. Konsep yang mampu menghadirkan pemahaman dan penilaian atas fenomena yang didasarkan tidak hanya bersifat materi namun juga non materi.

Kehadiran *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA) pada dasarnya merupakan sebuah keharusan. Suatu konsep pengembangan PEA yang lebih mengakui nilai-nilai dan pihak-pihak lain yang selama ini termarginalkan. PESA merupakan sebuah fenomena baru yang lebih natural dan lebih manusiawi, dan sunnatullah. Sebuah pendekatan yang lebih integral dengan memasukkan nilai-nilai *Tauhidiah* kedalam perspektif analisisnya. Jadi dengan pendekatan *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA) ini maka perspektif analisis akan semakin luas dan lebih leluasa dikarenakan tidak hanya dalam perspektif yang bersifat materi namun juga terhadap perspektif yang bersifat non materi. Selain itu perspektif lebih diperluas dengan cara menghargai keberadaan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan operasi perusahaan sebagai satu kesatuan sistem pertanggungjawaban.

Konsep Tauhid (kesatuan) adalah konsep kesatuan yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu "*homogeneous whole*" atau keseluruhan yang homogen,

serta menentingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (Naqvi,1993). Selanjutnya Muhammad (2002) menyatakan bahwa Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan Khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendakNya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.

Berdasarkan konsep Tauhid inilah maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan aspek yang intergral dan menyeluruh. Atas dasar pandangan ini pulalah maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

Konsekuensi dari aksioma ini adalah bahwa seorang muslim dalam menjalankan aktivitas maupun entitas bisnis tidak akan melakukan, paling tidak tiga hal yaitu *pertama* diskriminatif diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja, karyawan, danlainnya berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, posisi. Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai oleh manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. Ketiga, menimbun kekayaan

atau serakah terhadap dunia, karena hakikatnya kekayaan dunia itu merupakan amanah dari Allah SWT.

Konsep dasar PESA pada hakekatnya dikembangkan dengan cara menginternalisasi konsep-konsep Islami yang telah ada berkenaan dengan ekonomi antara lain konsep kepemilikan, konsep zakat, konsep keadilan serta konsep pertanggungjawaban, konsep distribusi kedalam PEA yang telah ada sebelumnya. Konsep-konsep sebagaimana disebut sebelumnya pada dasarnya merupakan dasar terbangunnya *shariah enterprise theory* yang digagas oleh Triyuwono (2006).

*Shariah enterprise theory* ini merupakan penyempurnaan teori yang mendasari enterprise teori sebelumnya. Disadari bahwa dalam teori ini belum mengakui adanya partisipasi lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi. Dengan kata lain bahwa konsep ini belum bisa dijadikan justifikasi bahwa *enterprise theory* menjadi konsep dasar teoritis, sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari *indirect participants*. Oleh karena itu Triyuwono (2006) dan Slamet (2001) mengusulkan apa yang dinamakan dengan *Shariate ET*. Menurut konsep ini *stakeholders* pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu *direct participants* dan *indirect participants*. *Direct stakeholders* adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan. Sedangkan *indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan.

#### 4.2. Konsep Kepemilikan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti

spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

Dalam konsep kepemilikan dalam Islam, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah bahwa Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada dalam di dunia. Hanya Allah saja yang berhak menguasai dan memiliki seluruh isi alam dunia. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam kitab sucinya.

*Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu (Ali Imron: 189)*

Berdasarkan ayat diatas bisa dipahami bahwa bahwa Allah SWT sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik Tunggal dan Mutlak, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah pertanggungjawaban untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (QS. Al-Baqarah (2) ayat 254 dan 267).

Manusia hanyalah diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taklif*) untuk menjadi seorang khalifa (*agen pembangunan/pengelola*) yang beribadah dimuka bumi ini. Inilah moral yang paling mendasari setiap bentukan etika seorang muslim dalam memberikan apresiasi terhadap kepemilikan dan kekayaannya.

Adalah hal yang naif jika kepemilikan kekayaan di muka bumi ini hanya dikuasai dan terkonsentrasi pada seseorang atau segelintir orang, untuk

kemudian dimanfaatkan dan diproduktifkan tanpa batas dan dengan motivasi *maximizing profit only*. Begitu pula adalah hal yang naif jika kemudian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya dapat dimiliki secara kolektif dan tidak ada kepemilikan pribadi dan yang ada hanya kepemilikan negara.

Berdasarkan pemahaman diatas maka hal ini sangat beralasan jika penggunaan sumber daya tersebut baik secara individu maupun kolektif dibatasi, karena memang pada hakikatnya *stakeholders* hanya memiliki hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah, tetapi ditujukan pada manusia yang mempunyai hak-hak atas sumber daya tersebut.

#### 4.3. Konsep Zakat

Konsep zakat dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Alquran:

*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka yang tidak dapat (berusaha) di bumi, orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta (QS. Al Baqorah (2): 273)*

Juga dalam ayat yang lain :

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah(9) : 60).*

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam pandangan konsep zakat distribusi kekayaan (wealth) tidak hanya berlaku pada pihak partisipan yang terkait langsung dalam atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan seperti pemegang saham, kreditor,

karyawan, dan pemerintah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Artinya cakupan akuntansi dalam konsep ini tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi akuntansi (*enterprises theory*) sebelumnya yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan. Sesungguhnya manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagian seluruh manusia dan alam. Berdasarkan pemahaman ini maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk bisa berbuat adil baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam semesta. Dengan demikian konsep ini akan membawa kemaslahatan bagi *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan keterampilan) serta lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet, 2001:268).

#### 4.4. Konsep Keadilan

Konsep keadilan Islam menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang dilihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis, dan tatanan ini dikenal dengan *sumatullah*. Sifat keadilan bukan

hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan keadilan atau keseimbangan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Pada struktur ekonomi dan bisnis agar kualitas keadilan dapat mengendalikan semua tindakan manusia maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, *pertama* hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Demikian pula sebaliknya memaksimumkan kesejahteraan "total" dan tidak berhenti sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip keadilan. Eksistensi manusia adalah makhluk *teomorfis* yang harus memenuhi ketentuan keadilan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.

*Ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya hak



milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia memerlukan pertanggungjawaban tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Al Qur'an dalam surat An Nisa (4) ayat 85 menegaskan:

*"Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul balasan nya."*

Sesungguhnya dalam ajaran Islam terdapat beberapa prinsip keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Qordawi (2001: 398 – 400) bahwa terdapat tujuh prinsip keadilan. Prinsip keadilan *pertama* adalah membedakan manusia berdasarkan keahlian dan kerja kerasnya. Artinya bahwa termasuk kezhaliman membedakan antara dua orang yang sama tanpa sebab dan alasan, dan bukan termasuk keadilan pula menyamakan antara dua orang yang berbeda karena nafsu persamaan. Sebagian faktor ini adalah karunia yang tidak ada campur tangan manusia padanya, seperti kecerdasan dan kemampuan fisik. Sedangkan sebagian lain merupakan sesuatu yang bisa diusahakan seperti kesungguhan dan ketekunan. (QS. Az-Zumar: 9, QS An-nisaa:95). *Kedua*, Pengakuan perbedaan pendapatan, artinya Islam mengakui ketidaksamaan yang adil sehingga tidak diragukan lagi akan mengakibatkan perbedaan dalam pendapatan. Hal yang perlu

dicatat adalah bahwa pelebihan ini bukan berarti tidak memberikan kepada sebagian orang sama sekali, dan memberikan segala sesuatu kepada orang lain. sesungguhnya pelebihan ini merupakan sunnatullah (hukum Allah) pada alam dan syariahnya.

Prinsip *ketiga*, pemerataan kesempatan yang mengandung maksud bahwa semua anggota masyarakat harus sama dalam mendapatkan hak untuk hidup, memiliki belajar, berobat, kelayakan hidup dan jaminan kemanan. Harus diberikan kesempatan yang sama dalam semua hal tersebut karena merupakan hak-hak kemanusiaan yang berhak mereka peroleh, sebagai manusia semata-mata dan bukan sebagai anak-anak kelas khusus. Prinsip *keempat*, memenuhi hak para pekerja, artinya Islam mengajarkan para pemberi kerja untuk senantiasa memenuhi hak pekerja. Dalam keadilan Islam tidak boleh seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara dia tidak mendapatkan upah dan gajinya secara layak, dikurangi dan bahkan ditunda-tunda (QS. Al-Kahfi:30). Tolok ukur yang harus digunakan bagi para pemberi kerja adalah keadilan Allah SWT. Hal yang harus dilakukan para pemberi kerja adalah memberikan upah standar kepadanya dan menambahkan upahnya seiring dengan penambahan usia dan perkembangan pengalamannya. Begitu pula setiap kali terjadi kenaikan harga dan setiap kali tercapai peningkatan keuntungan.

Prinsip *kelima*, takaful (kesetiakawanan sosial yang menyeluruh). Bahwasanya perlu ada jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu di masyarakat. Diantara orang-orang yang mampu bekerja ada orang yang harus menganggur dan tidak mendapatkan kerja sama sekali atau tidak mendapatkan kerja yang sesuai atau mendapat upah tetapi tidak mencukupi karena banyaknya

dengan undang-undang dan petuah-petuah moral untuk mendekatkan kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Islam membatasi ambisi kaum kaya dan mengangkat taraf hidup kaum miskin. Dalam ekonomi Islam yang mengakui adanya perbedaan dalam pendapatan melihat bahwa diantara prinsip keadilan adalah mendekatkan jurang perbedaan antara warga masyarakat untuk merealisasikan keseimbangan (tawazun), mematikan api kecemburuan dan kemarahan sosial dan demi menghindari faktor-faktor permusuhan dan perbenturan antara individu dan kelas-kelas sosial.

#### **4.5. Konsep Pertanggungjawaban**

Tanggungjawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis aksioma ini dijabarkan menjadi pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain.

Secara keseluruhan konsep pertanggungjawaban dalam Islam dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah (secara vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban secara horizontal pada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Triyuwono, 1997). Konsep pertanggungjawaban ini merupakan pengembangan dari hasil premis akuntansi syariah yang bersifat transedental dan teleologikal (Triyuwono, 2000), dimana

*stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikan pada seluruh makhluk di muka bumi secara adil.

Pertanggungjawaban ini sebagaimana dalam konsep Nilai Tambah Islam diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu (1) pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*direct stakeholders*) meliputi pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah dan lainnya. (2) pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*indirect stakeholders*) terdiri dari masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) serta lingkungan alam (pelestarian alam). Berdasarkan konsep value added ini maka pengguna laporan keuangan akan mengetahui kepada siapa nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh *stakeholders* (khususnya *indirect stakeholder*) akan terlihat pada *balance sheet* (neraca).

#### 4.6. Konsep Distribusi Kekayaan

An Nabhani (2000:52) menyatakan bahwa realitas menunjukkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan setiap individu, bukan kebutuhan manusia secara kolektif. Jadi permasalahan utama ekonomi terletak pada distribusi kekayaan kepada setiap individu (warga negara). Oleh karena itu maka harus dicarikan jalan keluar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan fiskal (QS. 59:7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Karenanya kebijakan keuangan tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak

didukung oleh mekanisme-mekanisme lain yang diatur melalui syariah Islam seperti mekanismen kepemilikan, pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan.

Karena itu, kebijakan fiskal di dalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi (*as siyasatu al iqtishadi*) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah/ basic needs*) individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai kadar kemampuan.

Distribusi kekayaan secara meluas mengandung maksud bahwa Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut.

Islam memandang masalah ekonomi tidak berasal dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan

masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah, dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi.

#### 4.7. Menggapai Political Economy of Shariah Accounting (PESA)

Konsep-konsep dalam *Shariah Enterprise Theory* pada uraian sebelumnya mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada dalam kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardi*). Oleh karena itu manusia harus selalu peduli terhadap seluruh pihak baik partisipan yang terkait langsung dan tidak langsung dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Manusia perlu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal pada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Manusia harus mampu mewujudkan keadilan yang hakiki bagi manusia itu sendiri, manusia lain, masyarakat seluruhnya, alam dan lingkungan serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik hakiki di dunia dan akhirat.

Nilai-nilai luhur dari konsep *shariah enterprise theory* ini kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan PESA dengan jalan menginternalisasinya. Dengan internalisasi nilai-nilai Tauhid maka *Political Economy of Accounting* (PEA) bisa lebih jauh dikembangkan sebagai pendekatan yang lebih integral dan tidak melepaskan aspek spiritual di dalamnya. Dengan demikian maka pendekatan PEA kemudian bisa diperluas dengan memasukkan aspek non material dan melibatkan pihak yang tidak langsung serta alamlingkungan

sebagaimana dianut dalam filsafat transedental dan filsafat teleologikal dalam teori akuntansi Syariah (Triyuwono,2006).

*Transedental* mengandung maksud bahwa akuntansi syariah tidak hanya mencakup satu disiplin ilmu atau satu aspek materi (ekonomi) saja. Diharapkan bahwa akuntansi bisa melewati sekat-sekat keilmuan yang mengekang dirinya dan merambah keseluruhan penjuru keilmuan dan bahkan dunia non materi. Dengan demikian maka konsepnya akan lebih lengkap dan semakin intergral dalam mengakomodir seluruh pemikiran dalam ilmu-ilmu diluar akuntansi khususnya dan masalah non materi pada umumnya. Adapun *Teleologikal* dimaknai bahwa akuntansi tidak hanya sekedar menjadi alat untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan ekonomi yang strategis namun demikian juga memiliki makna yang lebih luas yaitu merupakan wujud dari rasa tanggungjawab manusia terhadap Tuhan, kepada manusia lain, termasuk pula kepada alam semesta (Triyuwono; 2006).

Sementara ini dalam konsep PEA untuk memahami sebuah fenomena (kinerja) juga bisa dilihat dari beberapa perspektif yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Namun demikian dalam operasionalnya masih diarahkan pada kepentingan pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (memberikan kontribusi langsung pada bisnis perusahaan), misalnya bagaimana distribusi kekayaan terhadap investor, kreditor dan karyawan dilakukan. Sedangkan kepentingan pihak yang tidak memberikan kontribusi langsung sementara ini diabaikan, semisal masyarakat sekitar perusahaan, lingkungan alam dan lain sebagainya. Padahal keberadaan pihak-pihak yang tidak langsung ini juga sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh operasional perusahaan.

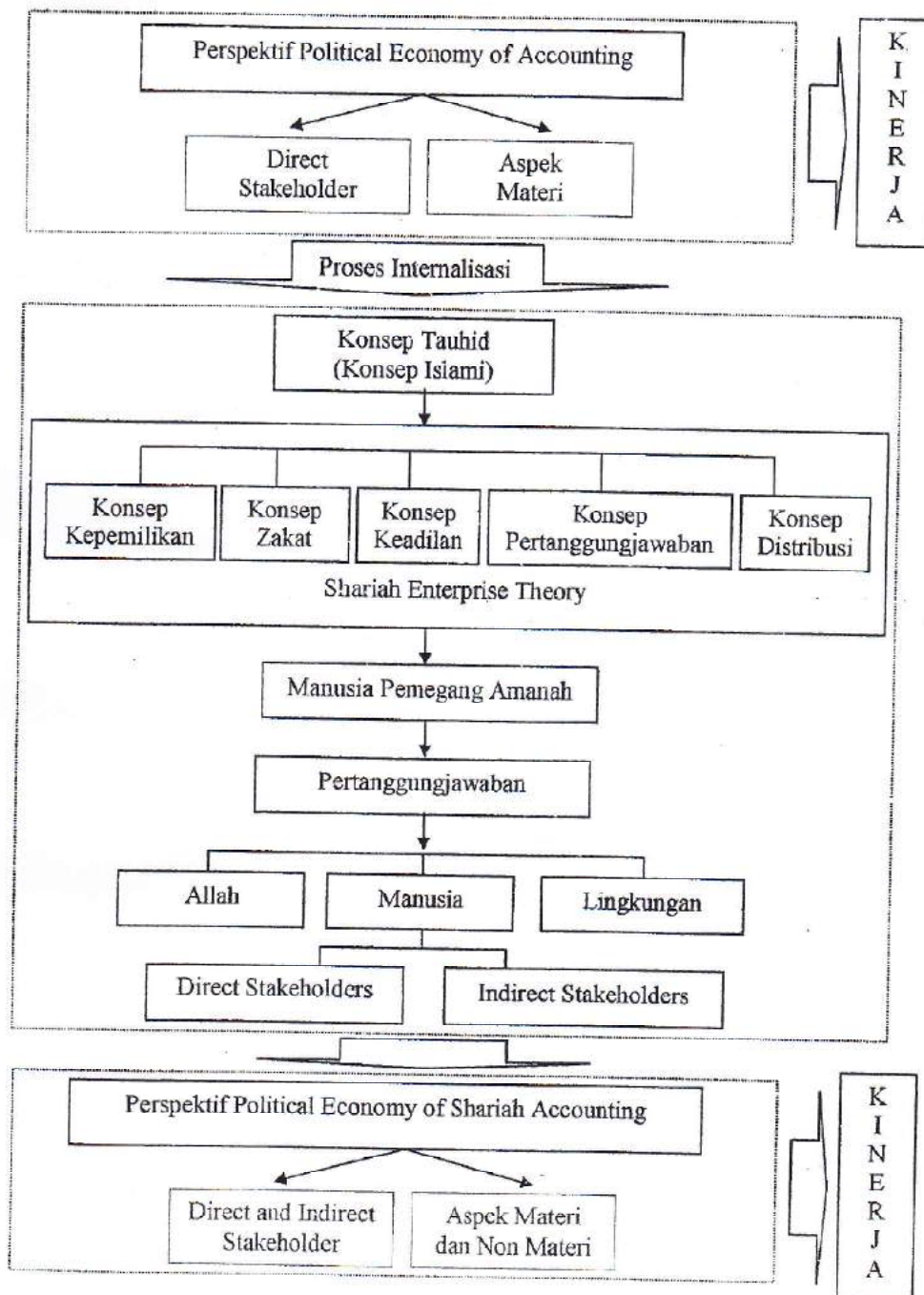
Selain itu PEA dalam memandang kinerja suatu institusi masih sebatas menggunakan ukuran materi saja misalnya dari ukuran keuangan, distribusi produk, efisiensi produk, pelayanan produk, jumlah pelanggan, kinerja karyawan dan lain-lain yang keseluruhannya identik dengan materi. Sedangkan ukuran kinerja yang bersifat non materi belum diungkap sebagai bagian dari penilaian kinerja suatu perusahaan. Beberapa contoh ukuran kinerja non materi misalnya *pertama*, tingkat kepedulian sosial perusahaan baik bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan dan lainnya sebagai konsekuensi keberadaan perusahaan di tengah-tengah komunitas. *Kedua*, kinerja lingkungan (ekologi) sebagai ukuran tingkat kepedulian perusahaan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan (analisis dampak lingkungan) yang ditimbulkan dari operasional perusahaan. Ukuran kinerja non materi sebagaimana disebut diatas merupakan sudut pandang kinerja yang sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan namun demikian belum sepenuhnya diungkapkan sebagai bagian dari kinerja perusahaan. Seandainya ukuran kinerja non materi ini dipadukan sebagai bagian yang utuh dari kinerja perusahaan maka akan semakin utuhlah pemahaman masyarakat terhadap kinerja yang riil dari sebuah perusahaan.

Disadari bahwa dalam konsep syariah hakekat kepemilikan berada dalam naungan Allah sedangkan manusia itu sebagai pemegang amanah (*khalifa*) dariNya. Sebagai khalifa di bumi tentu akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diemban selama ini. Pertanggungjawaban atas hubungannya dengan manusia (semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung dalam memberikan kontribusi), dengan lingkungan sekitar, alam dan pertanggungjawaban kepada Allah secara vertikal. Maka dengan demikian



pengembangan analisis PEA menjadi PESA (lihat Gambar 2.4.) dilakukan dengan mengarahkan perspektif analisis terhadap seluruh pihak untuk memadukan kepentingan pihak yang terkait maupun dengan pihak yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan, termasuk didalamnya adalah aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan misalnya akan bertujuan memahami kinerja perusahaan dilihat dari sudut pandang kelestarian alam atau lingkungan hidup tempat dimana perusahaan berada dan tempat dimana bahan baku perusahaan diperoleh. Dari aspek ini dilihat secara komprehensif bagaimana keterkaitan antara kinerja dengan perkembangan lingkungan alam sekitar. Apakah kinerja ekonomi meningkat berarti juga meningkatkan upaya pelestarian alam lingkungan sekitar perusahaan dan tempat bahan baku, ataukah malah sebaliknya semakin rusak lingkungan alam tersebut.

Selain itu dalam konsep PESA dalam memahami kinerja perusahaan dilihat tidak hanya dari ukuran atau indikator yang bersifat materi namun juga indikator yang bersifat non materi. Dengan demikian diharapkan kehadiran PESA dipihak lain akan mengakomodasi pihak-pihak yang sementara ini termarginalkan akibat sistem kapitalisme yang cenderung memisahkan nilai-nilai ruhaniah dari aktivitas ekonomi dan bisnis, juga akan memasukkan nilai non materi sebagai sudut pandang pemahaman sebuah kinerja perusahaan.



K  
I  
N  
E  
R  
J  
A

K  
I  
N  
E  
R  
J  
A

Gambar 4.1  
Konstruksi PEA Menuju PESA

Selanjutnya harapan dari pendekatan PESA adalah bahwa dengan memahami kinerja perusahaan yang melibatkan perspektif politik dalam kerangka ekonomi politik maka akan dihasilkan sebuah analisis yang lebih komprehensif dan lebih tepat, dikarenakan setting politik yang ada pada saat menghasilkan kinerja turut pula diketahui sebagai dasar dalam menyusun kinerja tersebut.

#### **4.8. Karakteristik Political Economy of Shariah Accounting**

*Political Economy of Shariah Accounting* (PESA) sebagai pengembangan lebih lanjut dari *Shariah Enterprise Theory* memiliki karakteristik unik dan unggul. Setidaknya terdapat enam karakteristik yang membedakannya dengan *Political Economy Accounting* (PEA). Keenam karakteristik yang menjadi ciri dari PESA tersebut secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.1.

Karakteristik pertama berkenaan dengan landasan sistem ekonomi yang mendasari terbangunnya PESA. PESA terbangun dengan dilandasi sistem perekonomian Islam (Syariah) sedangkan PEA didasari dengan sistem perekonomian kapitalis. PESA hadir dengan berorientasi pada penerapan sistem ekonomi Islam tentunya berupaya menyempurnakan konsep kapitalisme yang syarat dengan nilai-nilai materialis, individualis, egoistis dan *profit oriented* sebagaimana dianut dalam PEA. Dengan menggunakan orientasi ekonomi syariah maka segenap operasionalisasi perusahaan lebih ditujukan kepada arah kemaslahatan umat manusia, dan alam semesta. Ekonomi syariah membongkar nilai-nilai kapitalisme dan merubahnya menjadi nilai-nilai yang lebih humanis, emansipatoris, transedental serta teologikal.

**Tabel 4.1.**  
**Karakteristik PEA dan PESA**

<b>Keterangan</b>	<b>PEA</b>	<b>PESA</b>
<b>Landasan Ekonomi (Akuntansi)</b>	▪ Ekonomi Kapitalisme	▪ Ekonomi Islam (Syariah)
<b>Perspektif</b>	▪ Multiperspektif, tidak termasuk perspektif spiritual	▪ Multiperspektif, termasuk perspektif spiritual
<b>Distribusi Kekayaan (Nilai Tambah)</b>	▪ Pihak terkait langsung dengan operasi perusahaan	▪ Pihak terkait langsung dengan operasi perusahaan ▪ Pihak tidak terkait langsung dengan operasi perusahaan.
<b>Prinsip Kontribusi</b>	▪ Pihak yang langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan	▪ Pihak yang langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan ▪ Pihak yang tidak langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan
<b>Nilai Keadilan</b>	▪ Keadilan bagi manusia, terutama manusia yang terkait langsung	▪ Keadilan bagi manusia, langsung maupun tidak terkait langsung ▪ Keadilan bagi lingkungan alam ▪ Keadilan bagi Al Khalik
<b>Prinsip Pertanggungjawaban</b>	▪ Horisontal: Manusia Terkait Langsung	▪ Vertikal : Allah ▪ Horisontal : Umat Manusia Alam

Perspektif PESA yang multi perspektif dan diinternalisasi dengan nilai-nilai Tauhid menjadi karakteristik kedua yang membedakan dengan PEA. Sesungguhnya PEA juga memiliki perspektif yang luas dalam memahami sebuah fenomena sebagaimana PESA, namun demikian masih terdapat perspektif yang belum tercakup yaitu perspektif yang memiliki nilai-nilai Tauhid. Perspektif yang dimaksud dalam nilai-nilai Tauhid antara lain perspektif dari pihak yang tidak

terkait langsung dengan operasional perusahaan, dan juga dari perspektif lingkungan alam. Fenomena kinerja akuntansi misalnya tidak cukup hanya dilihat dari perspektif ekonomi dan non ekonomi pada sudut pandang pihak yang terkait langsung dengan operasional perusahaan, namun realitasnya hal itu tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan operasional perusahaan. Terlebih lagi memahami kinerja usaha dengan tidak memasukkan sudut pandang lingkungan alam dimana sumber daya usaha diperoleh oleh perusahaan menjadi semakin "hambar" nilai pemahaman tersebut.

Karakteristik ketiga adalah dalam memahami distribusi kekayaan (*wealth*). PEA masih mendasarkan pada premis bahwa untuk mendistribusikan kekayaan didasarkan pada pihak yang terkait langsung dengan operasi perusahaan saja sedangkan pihak yang tidak terkait langsung dengan operasi perusahaan tidak menjadi sasaran distribusi kekayaan. Adapun PESA tidak memisahkan antara pihak-pihak terkait dan tidak terkait sebagai target dalam mendistribusikan kekayaan. Seluruh pihak diasumsikan memberikan pengaruh terhadap usaha perusahaan, dan oleh karena itu maka seluruh pihak tersebut memiliki hak yang sama dalam memperoleh distribusi kekayaan.

Pihak yang langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan dan yang tidak langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan menjadi karakteristik keempat. PEA memandang bahwa pihak yang berkontribusi pada perusahaan adalah pihak yang memberikan kontribusi berupa dana atau keuangan serta keahlian yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan pihak yang tidak memberikan dana dan keahlian pada perusahaan dianggap bukan pihak yang berkontribusi dan oleh karena itu tidak harus mendapatkan

perhatian perusahaan. Konsep PESA dalam menilai pihak yang berkontribusi pada perusahaan tidak mendikotomi antara pihak yang memberi atau tidak memberi baik *skill* maupun dana bagi perusahaan. Dengan kata lain seluruh pihak menurut konsep ini perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan.

Karakteristik kelima yang membedakan PESA dari PEA adalah bahwa keadilan dalam PESA tidak semata-mata hanya keadilan bagi manusia yang secara langsung terkait dengan usaha perusahaan sebagaimana menjadi konsep utama PEA. PESA menghadirkan nilai keadilan juga bagi manusia yang tidak terkait langsung dengan usaha perusahaan, keadilan bagi lingkungan alam semesta dan juga keadilan bagi Sang Penguasa alam semesta.

Terakhir karakteristik prinsip pertanggungjawaban perusahaan, dimana PEA yang didasari dengan konsep *enterprises theory* yang lebih berorientasi profit dan oleh karenanya maka tanggungjawab perusahaan sepenuhnya hanya diarahkan bagi kepentingan pemilik modal (*stockholders*) semata, dan tentunya mengabaikan keberadaan pihak lain yang tidak memiliki kontribusi pada perusahaan untuk dijadikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban perusahaan. Sebaliknya PESA yang dibangun dari *shariah enterprises theory* tidak hanya berorientasi pada profit semata dan memiliki semangat mempertanggungjawabkan amanah yang telah diterima kepada Sang Pemberi Amanah dengan wujud segenap kegiatan usaha perusahaan diarahkan untuk kemaslahatan umat dan alam semesta secara jujur dan berkeadilan.

## Daftar Pustaka

- Clark, Barry. 1998. *Political Economy: A Comparative Approach. Second Edition. Praeger Publisher. London.*
- Cooper DJ, And Shere,MJ, 1984, The Value Of Corporate Accounting Reports: Arguments For A Political Economic Of Accounting, *Accounting, Organization And Society*, Vol. 5 No. 1 Pp. 161-166.
- Departemen Agama RI, 2000, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Hoogvelt, A & Tinker, A M, 1978, The Role of the Colonial and Post Colonial State a Imperialism, *Journal of Modern Studies* pp 67-79
- Ikbar, Yanuar, 2006, *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Teori*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Irianto, Gugus, 2006, *Privatisasi BUMN Di Indonesia: Pilihan Atau Keniscayaan? Telaah Dari Perspektif PEA*, *Proceeding, The Second Postgraduate Consortium On Accounting 2006*, Brawijaya University Malang.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Hal 196 -- 204.
- Muhammad Dan Fauroni, Lukman, 2002, *Visi Alquran Tentang Etika Dan Bisnis*, Penerbit Salemba Diniyah
- Shaoul, Jean, 1997a, A Critical Financial Analysis Of The Performance Of Privatised Industries : The Case Of The Water Industry In England And Wales, *Critical Perspectives On Accounting*, 8 , 479 – 505
- Shaoui, Jean, 1997b, The Power Of Accounting Reflecting On Water Privatization, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol 10 No. 3, 1997.
- Slamet, M, 2001, *Enterprises They Dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syariah)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Staniland, 1985, The New Political Economy, *Political Studies*, XLIII, 516-530.
- Tinker, T,1980, Towards A Political Economic Of Accounting: An Empirical Illustration Of The Cambridge Controversies, *Accounting, Organization And Society*, Vol. 5 No. 1 Pp. 147-160.
- Triyuwono, Iwan, 1997, Akuntansi Syariah Dan Koperasi Mencari Bentuk Dalam Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol.1 No.1: 1-46
- Uphoff And Ichman (1972), The Politics Of Organizational Undevelopment, *Industrial And Labour Relations Review*, October.
- Wahab, Solichin A., 1999, *Ekonomi Politik Pembangunan*, PT. Danar Wijaya, Malang.
- Wiboyo, Harry, 1988, *Kritik Terhadap Ekonomi Neo Klasik : Suatu Pengantar Menuju Pendekatan Ekonomi Politik Baru*, Makalah Lepas, Bandung.